

TESIS

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API
(Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)



OLEH :

STEVEN WIRATNO
NPM 201320251035

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016

TESIS

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API
(Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum**

OLEH :

**STEVEN WIRATNO
NPM 201320251035**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

JUDUL TESIS

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API
(Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)**

OLEH :

STEVEN WIRATNO
NPM 201320251035

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 7 NOPEMBER 2016

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Pembimbing II



Dr. M. Ibrahim, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal: 7 Nopember 2016

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor: SKEP/013/XI/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1 Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : STEVEN WIRATNO
NPM : 201320251035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API (Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Pembimbing II



Dr. M. Ibrahim, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : STEVEN WIRATNO

NPM : 201320251035

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 7 Nopember 2016



(STEVEN WIRATNO)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

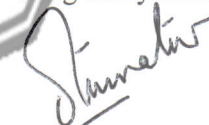
Nama : STEVEN WIRATNO
NPM : 201320251035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 November 2016
Yang menyatakan,


(STEVEN WIRATNO)

Dengan Bekerja Keras Akan Membuahkan Segala Cita-Cita Dan Berdoalah

Sambil Bekerja Ora Et Labora



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API’ (MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NO.12 TAHUN 1951) guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada dalam menyelesaikan tesis ini, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, M.M, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof.I Made Widnyana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Raya.
4. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Satu yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam penulisan tesis ini, serta memberikan koreksi dan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. M Ibrahim, S.H., M.H., selaku Pembimbing Dua yang penuh perhatian dan ketulusan memberikan koreksi teknis dalam penulisan tesis ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Istri saya tercinta Mida Husada, anak – anak tersayang Kevin Wiratno dan Kenny Wiratno, kakak, adik serta para kolega dan rekan – rekan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama proses penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan anugrah-Nya yang berlimpah bagi semua pihak yang telah mendukung penulis. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2015

Steven Wiratno



ABSTRAK

Tindak Pidana penyalahgunaan senjata api harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan unsur kesalahannya. Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api harus dilakukan secara adil sesuai tujuan hukum itu sendiri. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil? Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal *research* (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu : a).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b) Undang – Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, d) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, e) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api, f) Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakanaksanaan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan h) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia. Ijin Kepemilikan senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil dengan syarat dan mekanisme yang ketat, namun kelemahan kontrol terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil menyebabkan maraknya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil, dan oleh karena itu pelaku penyalahgunaan senjata api harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, yaitu dengan ancaman hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu Pemerintah harus berperan lebih aktif lagi dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api, melalui aparat penegak hukum : a) Pihak kepolisian harus lebih aktif lagi dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan senjata api melalui *sweeping/razia* rutin, penyuluhan hukum, memperketat izin kepengurusan senjata api, b) Pihak penegak hukum dalam hal ini hakim seharusnya menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api.

ABSTRACT

Crime misuse of firearms must be justified by the perpetrators of such crime by elements of guilt. Accountability Law Actors Abuse Crime Firearms regulated in Emergency Law No. 12 of 1951. Law enforcement against criminal misuse of firearms should be conducted fairly in accordance purposes of the law itself. The problems discussed in this study were (1) What is the terms and mechanisms of possession of firearms by civilians? (2) How does the legal liability criminal offense misuse of firearms by civilians? The research in this thesis uses legal research (normative), in this type of research focuses on the assessment rules or norms of positive law, the criminal justice system in Indonesia, namely: a) .Undang Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, b) Law - Law of the Republic of Indonesia Year 1981 About 8 Criminal Code (Criminal Code), c) of Law No. 8, 1948 On Registration and licensing Use of Firearms, d) Emergency Law No.12 of the year 1951, e) of the Republic of Indonesia Presidential Instruction No. 9 Year 1976 On Firearms, f) Decree of the Minister of Defense No. KEP-27 / XII / 1977 About Guidance Policy To Improve Monitoring and Control of Firearms, g) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2002 on the Indonesian National Police, and h) of the Regulation of the Minister of Defence of the Republic of Indonesia Number 7 of 2010 on guidelines for licensing , supervision and control of firearms in the military standard environmental defense ministry and the Indonesian national army. Permit ownership of firearms can be provided to civil society to the terms and mechanisms of strict, but the weakness of control against the possession of firearms by civilians led to the rampant misuse of firearms by civilians, and therefore the perpetrators of abuse of firearms should be accountable for their actions according to error element as set out in article 1, paragraph (1) of Emergency Law 12 of 1951, which is punishable by death, life imprisonment, or imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years. Besides, the government should play a more active again in an effort to tackle the crime of misuse of firearms, by law enforcement officers: a) The police should be more active in an effort to tackle the misuse of firearms through sweeping / regular raids, legal counseling, tighten license management firearms , b) the law enforcement in this case judges should impose the maximum sentence against the perpetrators of abuse of firearms.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana, Tujuan Pidana, Teori Pidana dan Fungsi Hukum Pidana	21
1. Pengertian Hukum Pidana	21
2. Tujuan Hukum Pidana	23
3. Teori Pidana	26

4. Fungsi Hukum Pidana	31
5. Sifat Hukum Pidana	32
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
C. Pertanggungjawaban Pidana	44
D. Pengertian Melawan Hukum	47
E. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan	55
F. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api	56
1. Pengertian Senjata Api	56
2. Jenis-Jenis Senjata Api.....	52
3. Senjata Api Yang Diperbolehkan UU Untuk Dimiliki Oleh Masyarakat Sipil	60
G. Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	60
H. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	62

**BAB III SYARAT DAN MEKANISME KEPEMILIKAN SENJATA API
OLEH MASYARAKAT SIPIL**

A. Pengertian Tentang Senjata Api.....	67
B. Syarat Kepemilikan Senjata Api	70
C. Mekanisme Kepemilikan Senjata Api	71

D. Masyarakat Sipil Atau Pejabat Yang Dapat Diberikan Ijin Penggunaan Senjata Api	78
E. Jenis-Jenis Senjata Api Yang Boleh Dimiliki Masyarakat Sipil.....	79
F. Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi.....	80
G. Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil	80
H. Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil	84

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA API**

A. Tindak Pidana penyalahgunaan Senjata Api	86
B. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Senjata Api	88
C. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api.....	89
D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN